

## COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM KANG PISMAN DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KOTA BANDUNG

Nadhif Alghifari<sup>1</sup>; Entang Adhy Muhtar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
Email Korespondensi : nadhif22001@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>; entang@unpad.ac.id<sup>2</sup>

*Submitted: 22-01-2026; Accepted: 30-03-2026; Published : 11-04-2026*

### ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari belum meratanya keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis perilaku Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan di Kelurahan Antapani Tengah, yang ditandai oleh perbedaan capaian antar Rukun Warga serta rendahnya ketaatan pemilahan pada sebagian wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan tata kelola kolaboratif antaraktor, terutama pada koordinasi, intensitas dialog lintas pemangku kepentingan, dan konsistensi partisipasi warga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam program tersebut di tingkat kelurahan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan pemerintah daerah terkait lingkungan, aparat kewilayahan, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pendamping kawasan, pengelola bank sampah, sektor swasta, serta warga. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi telah berjalan melalui struktur kewilayahan dan pendampingan teknis, namun pertemuan tatap muka lintas aktor masih jarang sehingga pemahaman bersama dan komitmen belum terbentuk merata, khususnya pada wilayah yang belum mencapai status kawasan bebas sampah. Kesimpulannya, diperlukan penguatan forum kolaborasi yang lebih rutin, inklusif, dan konsisten untuk memperluas capaian kawasan bebas sampah serta meningkatkan partisipasi pemilahan sampah.

**Kata kunci:** *Collaborative Governance; pengelolaan sampah; program Kurangi Pisahkan Manfaatkan.*

### ABSTRACT

*This study stems from the uneven success of the waste management program based on the behavior of Reduce, Sort, and Utilize in Antapani Tengah Subdistrict, as indicated by differing achievements across community units and low compliance with waste sorting in some areas. This condition points to challenges in collaborative governance among actors, particularly in coordination, the intensity of cross-stakeholder dialogue, and the consistency of community participation. The study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the program at the subdistrict level. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, observation, and document review, involving the local environmental authority, subdistrict officials, neighborhood and community leaders, area facilitators, waste bank managers, private sector actors, and residents. The findings show that collaboration has been implemented through local administrative structures and technical facilitation; however, face-to-face cross-actor meetings remain infrequent, resulting in uneven shared understanding and commitment, especially in areas that have not yet achieved the status of a waste-free community. In conclusion, strengthening a more regular, inclusive, and consistent collaboration forum is necessary to expand the achievement of waste-free communities and improve participation in household waste sorting.*

**Key word:** *Collaborative Governance; waste management; Reduce, Sort, and Utilize program.*

**PENDAHULUAN**

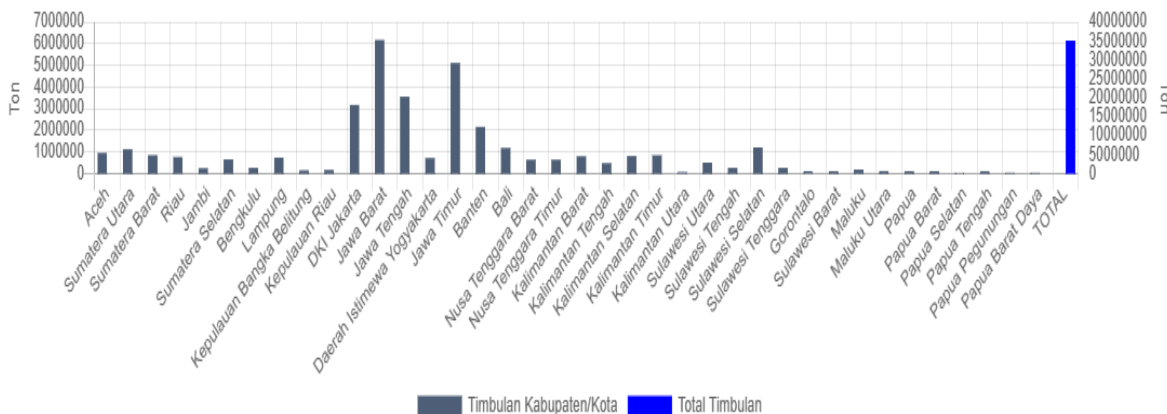
Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Pengelolaan sampah yang tidak optimal berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan, serta tekanan terhadap kapasitas infrastruktur persampahan. Pada konteks perkotaan, peningkatan timbulan sampah seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan yang memadai, sehingga memperbesar ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang dalam banyak kasus telah melebihi daya tampung.

Pada skala global, proyeksi peningkatan timbulan sampah terus menguat apabila tidak diikuti intervensi pengelolaan yang efektif; kondisi ini juga relevan bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan tingkat urbanisasi yang terus berkembang. Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan aktivitas ekonomi perkotaan mendorong volume sampah meningkat dari tahun ke tahun, sementara kapasitas pengelolaan dan partisipasi pemilahan di tingkat masyarakat belum sepenuhnya sebanding. Akibatnya,

sebagian besar sampah masih bergantung pada tempat pemrosesan akhir yang di banyak wilayah telah melampaui daya tampung, sehingga memperlebar kesenjangan antara timbulan sampah dan kemampuan penanganannya. Gambaran empirik mengenai sebaran timbulan sampah di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024, volume timbulan sampah nasional masih didominasi oleh sampah rumah tangga dengan kontribusi terbesar berasal dari kawasan perkotaan.

Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan timbulan sampah tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, tingginya volume sampah yang belum diimbangi dengan kapasitas pengelolaan memperlihatkan adanya tekanan struktural terhadap sistem persampahan nasional. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penguatan pendekatan pengelolaan berbasis sumber dan partisipasi masyarakat.

**Gambar 1. 1 Timbulan Sampah Nasional Tahun 2024**



Sumber: (KLHK, 2024)

Pengelolaan sampah di kota-kota besar di Indonesia hingga kini belum menunjukkan hasil yang optimal karena masih dihadapkan pada beragam kendala ekonomi, sosial, dan budaya. Kondisi tersebut menjadi titik strategis untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah, termasuk program “Kang Pisman” yang digulirkan

Pemerintah Kota Bandung sebagai pedoman pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui upaya mengurangi, memilah, dan memanfaatkan sampah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, serta menegaskan bahwa

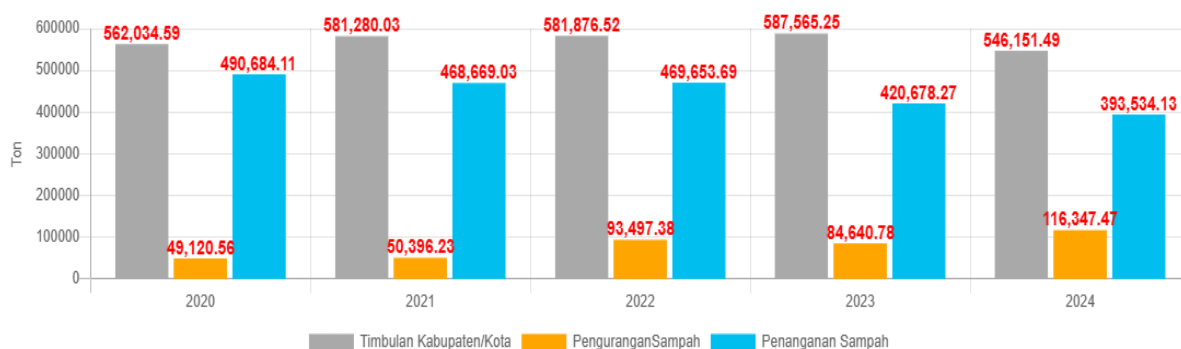
pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan mencakup pengurangan dan penanganan. Undang-undang tersebut juga mengklasifikasikan sampah ke dalam tiga kelompok utama, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dari berbagai fasilitas publik dan kegiatan ekonomi, serta sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Selain itu, regulasi ini menekankan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sekaligus kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan, yang kemudian diperkuat melalui berbagai kebijakan turunan pemerintah untuk mendukung sistem pengelolaan sampah.

Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Jawa Barat menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah.

data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah masih berada pada tingkat yang relatif tinggi dan cenderung fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan sampah yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menahan laju peningkatan volume sampah di tingkat kota.

Lebih lanjut, tingginya timbulan sampah tersebut berdampak langsung pada meningkatnya tekanan terhadap kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir Sarimukti, yang dalam beberapa periode mengalami kelebihan beban. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa persoalan sampah di Kota Bandung tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas tata kelola dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Gambar 1. 2 SIPSN Timbulan Sampah di Kota Bandung Tahun 2021 – 2024



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN, 2024)

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2024 menunjukkan bahwa timbulan sampah Kota Bandung pada periode 2020–2024 masih berada pada tingkat yang tinggi dan belum mengalami penurunan yang signifikan (SIPSN, 2024). Kondisi ini menegaskan bahwa berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah yang telah diimplementasikan belum sepenuhnya efektif dalam menekan laju timbulan sampah di tingkat kota. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara desain kebijakan pengelolaan sampah dengan realitas implementasinya di lapangan.

Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bandung tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek tata kelola

(governance), khususnya dalam hal koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan implementasi program. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan sampah modern memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah sebagai aktor utama. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan sampah tidak lagi dapat bergantung pada sistem “kumpul-angkut-buang”, melainkan perlu diarahkan pada model yang lebih partisipatif dan berbasis sumber (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengembangkan Program Kang Pisman sebagai upaya strategis untuk mendorong perubahan

perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan memanfaatkan sampah. Program ini dirancang tidak hanya sebagai intervensi teknis, tetapi juga sebagai pendekatan sosial yang menekankan keterlibatan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pemangku kepentingan lainnya. Dukungan regulatif melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 serta pembentukan satuan tugas melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 658.1/Kep.225-DLH/2020 menunjukkan bahwa program ini memiliki landasan kelembagaan yang relatif kuat (DLH Kota Bandung, 2025a).

Namun demikian, implementasi Program Kang Pisman di tingkat kewilayahan belum menunjukkan hasil yang merata. Di satu sisi, terdapat wilayah yang berhasil mencapai status Kawasan Bebas Sampah (KBS), namun di sisi lain masih terdapat wilayah yang belum mampu menjaga konsistensi pemilahan sampah maupun membangun kelembagaan pengelolaan yang berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan kolaborasi antaraktor dalam pelaksanaannya.

Kelurahan Antapani Tengah menjadi contoh empiris yang menunjukkan adanya variasi capaian tersebut. Dengan jumlah Rukun Warga yang relatif banyak dan karakteristik masyarakat yang heterogen, wilayah ini menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi warga dalam pengelolaan sampah. Laporan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa capaian program belum merata antar RW, sehingga memperlihatkan adanya perbedaan kapasitas kolaboratif di tingkat lokal (DLH Kota Bandung, 2025b).

Lebih lanjut, temuan awal menunjukkan bahwa kolaborasi dalam implementasi Program Kang Pisman masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlibatan aktor non-pemerintah yang belum konsisten, mekanisme koordinasi yang belum terlembagakan secara kuat, serta proses pengambilan keputusan yang masih cenderung terpusat pada aktor pemerintah. Minimnya forum dialog lintas aktor juga menyebabkan komunikasi dan penyelarasan peran belum berjalan optimal, sehingga kerja sama yang terbentuk belum berkembang menjadi kemitraan yang stabil dan

berkelanjutan. Temuan ini memperkuat bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga pada kualitas proses kolaboratif antaraktor dalam implementasi kebijakan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kolaboratif yang diharapkan dalam kebijakan dengan praktik implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses kolaborasi berlangsung, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas collaborative governance dalam implementasi Program Kang Pisman di tingkat kelurahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam dinamika *collaborative governance* (Ansell dan Gash, 2008) dalam implementasi Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali proses interaksi antaraktor, persepsi, serta pengalaman yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, serta pengalaman dalam implementasi Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 informan orang, yang terdiri dari berbagai aktor yang mewakili unsur pemerintah, pelaksana teknis, serta masyarakat, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
2. Kelurahan Antapani Tengah (lurah dan staf terkait)
3. Kawasan Bebas Samp (KBS)
4. Rukun Warga (RW)
5. Rukun Tetangga (RT)
6. Pengelola bank sampah
7. Masyarakat/warga yang terlibat dalam program

Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai tingkat pelaksanaan program, mulai dari perumus kebijakan, pelaksana di tingkat kewilayahan, hingga

masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Dilakukan kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, dan dinamika kolaborasi dalam implementasi program.

2. Observasi lapangan

Observasi dilakukan secara langsung di wilayah penelitian untuk melihat praktik pengelolaan sampah dan interaksi antaraktor. Aspek-aspek yang diobservasi meliputi:

- Aktivitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga
- Keberadaan dan pemanfaatan sarana prasarana (komposter, bank sampah, dll.)
- Interaksi antara pengurus RW, pendamping, dan masyarakat
- Partisipasi warga dalam kegiatan terkait Kang Pisman
- Kondisi lingkungan dan pengelolaan sampah di wilayah RW

3. Dokumentasi

Mengumpulkan data sekunder berupa laporan monitoring dan evaluasi, kebijakan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Selain itu, analisis data dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada model analisis interaktif, yang meliputi:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian data (*data display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau kategorisasi berdasarkan dimensi *collaborative governance*.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap akhir dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menemukan pola, hubungan antar variabel, serta menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini

dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta data observasi dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang digunakan sebagai kerangka dalam penelitian ini, hasil penelitian diinterpretasikan menggunakan dimensi *collaborative governance* (Ansell dan Gash, 2008) yang mencakup *starting conditions*, *institutional design*, *facilitative leadership*, dan *collaborative process* untuk menjelaskan dinamika pelaksanaan Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah. Kerangka ini digunakan untuk melihat sejauh mana prasyarat kolaborasi terbentuk, bagaimana aturan main dan struktur kelembagaan bekerja, bagaimana kepemimpinan mendorong keterlibatan lintas aktor, serta bagaimana proses dialog dan kerja bersama dijalankan dalam praktik sehari-hari.

### 1. *Starting Conditions*

Menurut Ansell dan Gash (2008), kondisi awal (*starting conditions*) merupakan faktor fundamental yang memengaruhi dinamika dan arah perkembangan kolaborasi. Dimensi ini mencakup keseimbangan kekuasaan dan sumber daya (*power-resource balance*), tingkat kepercayaan awal antaraktor, serta insentif untuk berpartisipasi. Apabila sejak awal terdapat ketimpangan kapasitas maupun dominasi otoritas tertentu, maka proses kolaborasi berpotensi berjalan tidak setara dan sulit membangun komitmen kolektif yang berkelanjutan.

Dalam konteks Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah, kondisi awal kolaborasi menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan secara normatif sebenarnya telah tersedia. Program ini memiliki landasan regulatif yang kuat dan didukung oleh struktur kewilayahan, pendamping teknis, serta alokasi sarana prasarana secara bertahap melalui dana kewilayahan. Dukungan tersebut mencerminkan bahwa dari sisi formal-institusional, pemerintah telah menyediakan *power resources* yang cukup untuk menggerakkan implementasi program di tingkat lokal.

Namun demikian, temuan lapangan

menunjukkan bahwa keseimbangan kapasitas antaraktor belum sepenuhnya merata. Pada fase sebelum terbentuknya Kawasan Bebas Sampah (KBS), pola pengelolaan sampah di sebagian wilayah masih didominasi skema “kumpul-angkut-buang” dan belum bertransformasi menjadi “kumpul-pilah-olah-buang”

Kondisi ini menggambarkan bahwa kesiapan sosial dan perubahan perilaku masyarakat belum terbentuk secara kuat sebagai prasyarat kolaborasi. Dengan kata lain, problem awal bukan semata pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada kesenjangan kapasitas partisipatif di tingkat warga. Dari aspek relasi antaraktor, kelurahan berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang menjembatani kebijakan DLH dengan pelaksanaan di tingkat RW.

Mekanisme koordinasi formal seperti rapat rutin dan pelaporan pendamping menunjukkan adanya struktur komunikasi yang berjalan. Akan tetapi, dalam praktiknya, efektivitas kolaborasi sangat bergantung pada keberadaan figur penggerak (key person) di tingkat RW. Wilayah yang memiliki tokoh lokal aktif menunjukkan perkembangan lebih cepat dalam pembentukan KBS, sedangkan RW yang tidak memiliki penggerak cenderung mengalami stagnasi. Hal ini menandakan bahwa distribusi kapasitas kepemimpinan lokal menjadi faktor pembeda utama dalam starting conditions antarwilayah.

Selain itu, tantangan perubahan mindset dan konsistensi perilaku warga menjadi elemen krusial dalam kondisi awal kolaborasi. Seperti terungkap dalam wawancara pendamping, persoalan utama bukan pada memulai program, melainkan menjaga keberlanjutan praktik pemilahan dalam kehidupan sehari-hari.

Mobilitas warga yang tinggi, keberadaan penyewa kontrakan, serta heterogenitas sosial turut memengaruhi stabilitas komitmen kolektif di tingkat komunitas. Dalam konteks teori Ansell dan Gash, kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial awal (initial trust dan shared motivation) belum terbentuk secara merata di seluruh RW.

Dengan demikian, starting conditions Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah dapat dipahami sebagai kondisi yang secara struktural didukung oleh regulasi dan sumber daya kelembagaan, namun secara sosial masih menghadapi ketimpangan kapasitas

partisipasi dan kepemimpinan lokal. Ketidakseimbangan ini berdampak pada variasi kesiapan kolaboratif antar RW, yang pada akhirnya menjelaskan mengapa capaian KBS dan tingkat ketaatan pemilahan sampah belum merata. Oleh karena itu, tantangan pada dimensi kondisi awal bukan terletak pada ketiadaan dukungan formal, melainkan pada penguatan distribusi kapasitas, pembentukan figur penggerak, serta pembangunan kepercayaan dan motivasi kolektif di tingkat komunitas.

## **2. Institutional Design**

Menurut Ansell dan Gash (2008), desain kelembagaan (institutional design) merujuk pada seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur bagaimana kolaborasi dibangun, dijalankan, serta diawasi. Desain kelembagaan mencakup aspek inklusivitas partisipasi, transparansi pengambilan keputusan, kejelasan pembagian peran, serta keberadaan forum dialog yang terstruktur. Tanpa desain kelembagaan yang jelas dan operasional, kolaborasi berisiko berjalan sporadis dan bergantung pada inisiatif individual semata.

Secara normatif, Program Kang Pisman memiliki fondasi regulatif yang kuat. Kerangka kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018, hingga Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Gerakan Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan secara terpadu dari hulu ke hilir dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, secara desain makro, kolaborasi multipihak telah menjadi prinsip normatif dalam penyelenggaraan program. Pada tingkat kelurahan, desain kelembagaan diwujudkan melalui struktur koordinasi kewilayahan yang melibatkan DLH, kecamatan, kelurahan, RW/RT, pendamping KBS, pengelola bank sampah, serta sektor swasta. Kelurahan berperan sebagai fasilitator dan koordinator wilayah, menjembatani kebijakan kota dengan pelaksanaan operasional di tingkat RW

Selain itu, terdapat mekanisme rapat koordinasi rutin antara kelurahan dan pendamping teknis untuk memonitor progres

tiap RW dan mengidentifikasi kendala lapangan. Struktur ini menunjukkan bahwa secara formal, terdapat saluran komunikasi dan mekanisme monitoring yang cukup jelas.

Namun demikian, temuan penelitian dalam skripsi menunjukkan bahwa desain kelembagaan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi secara merata di seluruh RW. Ada beberapa masalah dalam dimensi ini:

1. Meskipun forum koordinasi tersedia, partisipasi tidak selalu inklusif dan menjangkau seluruh aktor secara konsisten. Indikasi masalah yang kamu rumuskan dalam kerangka pemikiran menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi dalam forum kolaborasi belum menjangkau seluruh aktor secara merata. Pada beberapa RW Non-KBS, forum dialog cenderung bersifat insidental dan tidak menjadi mekanisme deliberatif yang berkelanjutan.
2. Transparansi dan distribusi informasi program belum sepenuhnya merata. Berdasarkan wawancara dengan aktor di tingkat RT, informasi program umumnya disampaikan melalui rapat RW atau kelurahan, tetapi warga yang tidak hadir pertemuan seringkali tidak memperoleh informasi yang utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain komunikasi program masih sangat bergantung pada mekanisme tatap muka konvensional dan belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik sosial masyarakat yang heterogen dan mobilitas tinggi.
3. Pembagian peran antaraktor memang telah ditentukan secara normatif, tetapi dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan kuat pada struktur kewilayahan formal. Peran RT umumnya terbatas pada sosialisasi dan pengingat kepada warga, sementara pengambilan keputusan strategis lebih banyak berada pada level kelurahan atau DLH.

Hal ini mengindikasikan bahwa desain kelembagaan belum sepenuhnya mendorong distribusi kewenangan yang lebih partisipatif dalam proses perumusan solusi di tingkat mikro.

Dengan demikian, institutional design

Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah dapat dikategorikan sebagai desain yang secara normatif kuat namun secara operasional belum sepenuhnya inklusif dan terlembagakan secara merata. Struktur formal dan regulasi telah tersedia, tetapi efektivitasnya dalam membangun kolaborasi setara masih dipengaruhi oleh variasi kapasitas lokal, intensitas forum koordinasi, serta mekanisme komunikasi yang belum adaptif. Oleh karena itu, penguatan desain kelembagaan tidak hanya memerlukan keberadaan aturan formal, tetapi juga penguatan mekanisme deliberatif yang rutin, transparan, dan menjangkau seluruh aktor secara konsisten di tingkat RW.

### 3. *Facilitative Leadership*

Menurut Ansell dan Gash (2008), *facilitative leadership* merupakan elemen kunci yang menjaga proses kolaborasi tetap inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pembentukan komitmen bersama. Kepemimpinan dalam konteks ini bukan semata-mata bersifat hierarkis atau komando, melainkan berfungsi sebagai *enabling leadership* yang mampu membuka ruang deliberasi, menjembatani perbedaan kepentingan, serta memobilisasi partisipasi aktor non-pemerintah.

Dalam implementasi Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah, kepemimpinan kewilayahan memiliki posisi sentral sebagai simpul koordinasi. Lurah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dengan pelaksanaan operasional di tingkat RW, sekaligus memastikan program masuk ke dalam agenda pembangunan wilayah. Selain itu, kelurahan juga mendukung program melalui alokasi dana kewilayahan (PIP) untuk penyediaan sarana pengelolaan sampah seperti komposter, ember tumpuk, maupun fasilitas lubang Loseda bagi RW yang berkomitmen menjadi Kawasan Bebas Sampah (KBS).

Dari sisi koordinasi vertikal, hubungan antara kelurahan, pendamping KBS, dan DLH terjalin secara rutin melalui mekanisme pelaporan dan rapat sinkronisasi data. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, kepemimpinan fasilitatif telah diupayakan melalui pembentukan jalur komunikasi dan monitoring yang relatif intensif.

Namun demikian, temuan skripsi kamu menunjukkan bahwa efektivitas *facilitative leadership* sangat bergantung pada keberadaan figur penggerak lokal di tingkat RW. Pada RW yang memiliki tokoh aktif dan mampu memobilisasi warga, capaian KBS relatif lebih stabil dan partisipasi pemilahan lebih konsisten. Sebaliknya, pada RW Non-KBS yang tidak memiliki figur penggerak kuat, fasilitasi dari kelurahan belum selalu berhasil mendorong perubahan perilaku dan pembentukan kepatuhan kolektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif belum terdistribusi secara merata pada seluruh unit kewilayahan.

Dalam perspektif Ansell dan Gash, situasi tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pemimpin sebagai *enabler* belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam membangun komitmen kolektif dan menjaga keberlanjutan proses kolaborasi. Kepemimpinan di tingkat kelurahan memang berfungsi sebagai pengarah dan koordinator, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi kepemimpinan yang memperluas otonomi dan inisiatif aktor RW secara setara. Akibatnya, kolaborasi masih cenderung terpusat pada struktur formal pemerintahan dan belum sepenuhnya bertumpu pada dinamika komunitas.

Selain itu, tantangan perubahan perilaku warga menjadi ujian utama bagi kepemimpinan fasilitatif. Seperti diungkapkan dalam wawancara pendamping, memulai program relatif lebih mudah dibanding menjaga konsistensi pemilahan sampah dalam praktik sehari-hari.

Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif tidak hanya dituntut membangun koordinasi administratif, tetapi juga membangun motivasi sosial, kesadaran kolektif, dan keteladanan di tingkat komunitas.

Dengan demikian, *facilitative leadership* dalam Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang secara struktural telah berjalan melalui koordinasi formal dan dukungan operasional, tetapi secara substantif masih menghadapi ketimpangan distribusi kapasitas kepemimpinan lokal. Ketergantungan pada figur tertentu menyebabkan keberhasilan program cenderung terkonsentrasi pada RW yang memiliki penggerak aktif, sementara RW lain mengalami stagnasi. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan fasilitatif ke depan

tidak hanya memerlukan koordinasi vertikal yang rutin, tetapi juga strategi sistematis untuk menumbuhkan dan mendukung *local champions* di setiap RW guna membangun komitmen kolektif yang berkelanjutan.

#### **4. Collaborative Process**

*Collaborative process* merupakan inti dari keseluruhan dinamika tata kelola kolaboratif. Apabila *starting conditions* menggambarkan prasyarat awal, *institutional design* menyediakan aturan main, dan *facilitative leadership* menggerakkan interaksi, maka *collaborative process* adalah ruang aktual di mana kolaborasi benar-benar diuji dalam praktik sehari-hari. Pada tahap inilah aktor-aktor yang terlibat tidak hanya hadir secara struktural, tetapi berinteraksi, bernegosiasi, membangun makna bersama, serta menguji konsistensi komitmen mereka terhadap tujuan kolektif.

Ansell dan Gash menekankan bahwa proses kolaboratif bukanlah rangkaian prosedur administratif yang kaku, melainkan siklus dinamis yang ditopang oleh dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pembentukan kesepahaman bersama, serta capaian-capaian antara yang memperkuat legitimasi kolaborasi. Proses ini bersifat iteratif, artinya setiap elemen saling memengaruhi dan membentuk lingkaran penguatan (*virtuous cycle*). Ketika dialog berlangsung intensif, kepercayaan tumbuh; ketika kepercayaan menguat, komitmen semakin kokoh; ketika komitmen terjaga, kesepahaman bersama lebih mudah dibangun; dan ketika capaian antara dirasakan nyata, motivasi kolektif untuk melanjutkan kolaborasi semakin besar.

Dalam konteks Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah, dimensi *collaborative process* menjadi sangat relevan untuk menjelaskan mengapa capaian program belum merata antar RW meskipun dukungan regulatif dan struktur kelembagaan telah tersedia. Temuan skripsi menunjukkan bahwa kolaborasi memang telah berjalan melalui mekanisme koordinasi kewilayahan dan pendampingan teknis, tetapi proses interaksi deliberatif antaraktor belum sepenuhnya konsisten dan merata. Pada sebagian RW, terutama yang telah mencapai status Kawasan Bebas Sampah (KBS), proses kolaboratif relatif lebih stabil karena adanya figur penggerak dan interaksi yang lebih intensif. Namun pada RW

Non-KBS, dinamika proses kolaboratif cenderung lebih lemah, terutama dalam menjaga keberlanjutan dialog dan konsistensi partisipasi warga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek teknis pengelolaan sampah, melainkan pada kualitas interaksi sosial yang menopang perubahan perilaku kolektif. Transformasi dari pola “kumpul-angkut-buang” menuju “kumpul-pilah-olah-buang” bukan sekadar perubahan prosedural, tetapi perubahan norma sosial yang membutuhkan proses komunikasi berulang, pembentukan kepercayaan, serta internalisasi tujuan bersama. Tanpa proses kolaboratif yang kuat, kebijakan cenderung berhenti pada tataran formal dan tidak sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik warga sehari-hari.

Selain itu, collaborative process juga memperlihatkan bagaimana distribusi kapasitas antar RW memengaruhi siklus penguatan kolaborasi. Keberhasilan pada RW tertentu berfungsi sebagai bentuk *small wins* yang berpotensi memperkuat legitimasi program. Namun, apabila keberhasilan tersebut tidak ditransmisikan melalui forum dialog yang inklusif, maka efek penguatan kolektif tidak berkembang secara sistemik. Artinya, proses kolaboratif dalam konteks ini belum sepenuhnya membentuk spiral penguatan yang merata di seluruh wilayah kelurahan.

Dengan demikian, analisis collaborative process dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana interaksi antaraktor berlangsung dalam praktik, sejauh mana dialog tatap muka dijalankan secara rutin dan inklusif, bagaimana kepercayaan dibangun melalui pengalaman bersama, bagaimana komitmen dijaga dalam menghadapi hambatan perubahan perilaku, bagaimana kesepahaman mengenai tujuan program terbentuk, serta bagaimana capaian-capaian antara memengaruhi motivasi kolektif. Kelima sub-dimensi tersebut dianalisis secara berurutan untuk memahami kualitas dinamika kolaboratif dalam implementasi Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah.

Dalam kerangka Collaborative Governance, dimensi collaborative process tidak dapat dipahami sebagai tahapan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu proses dinamis yang saling berkaitan dan membentuk siklus penguatan kolaborasi. Setiap elemen dalam

proses ini berperan dalam membangun kualitas interaksi antaraktor, mulai dari bagaimana dialog awal dilakukan, bagaimana kepercayaan terbentuk, hingga bagaimana komitmen dan kesepahaman bersama berkembang dalam praktik.

Dalam konteks implementasi Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah, proses kolaboratif menunjukkan variasi dinamika antar wilayah, yang dipengaruhi oleh intensitas interaksi, kapasitas aktor, serta keberadaan penggerak lokal. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana kolaborasi berlangsung, analisis pada dimensi collaborative process dalam penelitian ini diuraikan ke dalam beberapa sub-dimensi utama, yaitu *face-to-face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*.

#### a. *Face-to-face dialogue*

Dalam model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008), dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) merupakan fondasi utama proses kolaboratif. Dialog langsung memungkinkan aktor untuk menyampaikan pandangan, mengklarifikasi perbedaan persepsi, membangun rasa saling memahami, serta menciptakan ruang deliberasi yang setara. Tanpa dialog yang intensif dan inklusif, kolaborasi cenderung berubah menjadi mekanisme administratif yang bersifat satu arah dan kurang mampu membangun komitmen kolektif.

Dalam konteks Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah, mekanisme dialog formal sebenarnya tersedia melalui rapat koordinasi antara kelurahan, pendamping KBS, dan perwakilan RW. Koordinasi ini dilakukan secara rutin dalam bentuk pertemuan bulanan maupun pelaporan berkala kepada DLH, yang berfungsi untuk mengevaluasi perkembangan tiap RW dan mengidentifikasi hambatan lapangan. Secara struktural, kondisi ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi vertikal relatif berjalan dan terdapat ruang interaksi formal antaraktor pemerintahan dan pelaksana teknis.

Namun, apabila ditinjau lebih dalam, intensitas dialog lintas aktor belum sepenuhnya merata pada seluruh level kolaborasi. Pada tingkat RW dan warga, dialog seringkali berlangsung dalam forum rapat RW atau

sosialisasi awal pembentukan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Pada fase awal implementasi, dialog cenderung lebih aktif karena adanya dorongan pembentukan komitmen bersama. Akan tetapi, setelah fase inisiasi, frekuensi dialog di beberapa RW, khususnya RW Non-KBS, tidak selalu konsisten. Informasi program lebih banyak disampaikan melalui mekanisme rapat rutin yang tidak selalu dihadiri seluruh warga.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dialog belum sepenuhnya berkembang menjadi forum deliberatif yang memungkinkan pertukaran gagasan secara dua arah. Dalam beberapa kasus, dialog lebih bersifat penyampaian arahan atau sosialisasi kebijakan, bukan ruang diskusi terbuka untuk merumuskan solusi bersama. Padahal, menurut Ansell dan Gash, kualitas dialog sangat menentukan keberhasilan pembentukan kepercayaan dan kesepahaman bersama. Dialog yang deliberatif mendorong aktor merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sedangkan dialog yang bersifat informatif cenderung mempertahankan pola hierarkis.

Selain itu, variasi intensitas dialog antar RW turut memengaruhi capaian program. RW yang telah mencapai status KBS umumnya memiliki komunikasi internal yang lebih aktif, baik antara pengurus RW, RT, maupun warga. Kehadiran figur penggerak lokal mempermudah koordinasi dan menjaga kontinuitas interaksi. Sebaliknya, pada RW Non-KBS yang tidak memiliki figur penggerak kuat, dialog cenderung bersifat sporadis dan bergantung pada momentum tertentu. Hal ini menyebabkan penyesuaian peran dan pembahasan kendala tidak selalu berlangsung secara sistematis.

Aspek lain yang memengaruhi efektivitas dialog adalah karakteristik sosial masyarakat Antapani Tengah yang relatif heterogen dan memiliki mobilitas tinggi. Warga baru atau penyewa kontrakan tidak selalu terlibat dalam forum-forum kewilayahan, sehingga proses komunikasi dan internalisasi nilai program menjadi kurang optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa desain dialog yang masih bertumpu pada forum tatap muka konvensional belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial lokal.

Dari perspektif teori, lemahnya konsistensi dialog lintas aktor dapat menghambat terbentuknya collaborative

learning. Ansell dan Gash menekankan bahwa dialog yang berulang memungkinkan aktor belajar dari pengalaman bersama, mengidentifikasi praktik terbaik, dan menyesuaikan strategi implementasi. Dalam konteks Kang Pisman, apabila forum lintas RW tidak dimanfaatkan sebagai ruang berbagi praktik keberhasilan (misalnya dari RW KBS kepada RW Non-KBS), maka efek penguatan kolektif menjadi terbatas dan tidak menyebar secara sistemik.

Dengan demikian, analisis face-to-face dialogue dalam Program Kang Pisman menunjukkan bahwa meskipun mekanisme komunikasi formal telah tersedia, kualitas dan konsistensi dialog belum sepenuhnya deliberatif dan inklusif pada seluruh tingkat aktor. Dialog vertikal relatif berjalan, tetapi dialog horizontal antar RW dan antar warga belum sepenuhnya stabil. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya proses penyesuaian persepsi dan pembentukan kesepahaman bersama, yang pada akhirnya memengaruhi keberlanjutan kolaborasi dan pemerataan capaian program di seluruh RW Kelurahan Antapani Tengah.

#### ***b. Trust Building***

*Trust building* menekankan proses membangun kepercayaan melalui interaksi berulang, transparansi peran, dan konsistensi tindakan antaraktor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena dialog lintas aktor tidak intensif, pembangunan kepercayaan cenderung berkembang tidak merata. Pada RW yang memiliki penggerak aktif dan lebih sering berinteraksi dengan pendamping atau pihak kelurahan, kepercayaan relatif lebih mudah terbentuk dan program berjalan lebih stabil. Namun, pada RW lain yang jarang terlibat dalam forum dan koordinasi, hubungan kerja sama cenderung lemah dan rentan terputus, sehingga partisipasi masyarakat tidak berkembang menjadi keterlibatan yang kuat dan berkelanjutan.

#### ***c. Commitment to Process***

Sub-dimensi ini menekankan komitmen para pihak untuk terus terlibat dalam proses kolaborasi, termasuk kesiapan berbagi peran dan bertahan menghadapi hambatan. Dalam penelitian ini, komitmen antaraktor terlihat belum sepenuhnya kokoh karena kolaborasi masih bersifat tentatif dan belum terlembagakan

secara berkelanjutan. Keterlibatan aktor non-pemerintah, khususnya pihak swasta, cenderung tidak konsisten dan bergantung pada kepentingan atau momentum tertentu. Selain itu, ketergantungan pada pemerintah sebagai aktor utama pengambilan keputusan membuat komitmen aktor lain kurang berkembang menjadi komitmen kolektif, sehingga keberlanjutan proses kolaborasi belum terbentuk merata pada seluruh RW.

#### **d. Shared Understanding**

*Shared understanding* merujuk pada terbentuknya kesepahaman bersama mengenai tujuan, masalah, peran masing-masing aktor, serta strategi pelaksanaan program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minimnya dialog tatap muka dan forum koordinasi berdampak pada belum kuatnya kesepahaman bersama antaraktor dalam menjalankan Kang Pisman. Pada praktiknya, tujuan dan standar pelaksanaan, termasuk pemaknaan mengenai indikator capaian seperti Kawasan Bebas Sampah, tidak selalu dipahami secara sama di tingkat RW. Akibatnya, pelaksanaan program lebih sering dipersepsikan sebagai instruksi program yang dijalankan, bukan sebagai agenda bersama yang dibangun melalui kesepahaman lintas aktor. Kondisi ini turut memengaruhi rendahnya *sense of ownership* dan menyebabkan partisipasi warga di sebagian RW masih bersifat mengikuti arahan.

#### **e. Intermediate Outcomes**

Sub-dimensi *intermediate outcomes* menjelaskan hasil antara yang muncul selama proses kolaborasi, seperti peningkatan kapasitas, terbentuknya jaringan kerja, kesepakatan operasional, atau perubahan perilaku awal yang menjadi pijakan capaian jangka panjang. Dalam penelitian ini, hasil antara terlihat dalam bentuk capaian parsial: sebagian RW telah mampu mencapai status Kawasan Bebas Sampah dan menunjukkan tingkat ketaatan pemilahan yang lebih baik. Namun, hasil tersebut belum menyebar secara merata karena proses kolaboratif belum berjalan kuat pada RW lain.

Masih terdapat RW yang belum mencapai status Kawasan Bebas Sampah dengan rata-rata ketaatan pemilahan rendah dan belum terbentuk kelembagaan pengelolaan sampah yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa hasil antara dari proses kolaborasi belum cukup kuat untuk mendorong perubahan perilaku pemilahan sampah secara menyeluruh di Kelurahan Antapani Tengah.

Berdasarkan analisis menggunakan dimensi *collaborative governance* (Ansell dan Gash, 2008), dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah berada dalam kondisi “kolaborasi parsial”. Pada dimensi *starting conditions*, ditemukan ketimpangan kapasitas dan peran antaraktor, di mana otoritas dan agenda program lebih banyak ditentukan oleh aktor pemerintah sehingga ruang partisipasi aktor RW/RT, komunitas, dan warga dalam perumusan keputusan belum berkembang setara. Pada dimensi *institutional design*, kerangka regulasi dan struktur pelaksana program telah tersedia, namun belum sepenuhnya berfungsi sebagai aturan main kolaborasi yang mengikat di tingkat kelurahan karena forum koordinasi lintas aktor belum berjalan rutin dan prosedur kerja bersama belum terinternalisasi merata. Pada dimensi *facilitative leadership*, kepemimpinan kewilayahan berperan penting sebagai simpul koordinasi, tetapi masih cenderung berorientasi pada pengendalian pelaksanaan dibanding memfasilitasi deliberasi yang inklusif, sehingga *sense of ownership* aktor non pemerintah belum terbentuk kuat. Selanjutnya, pada dimensi *collaborative process*, rendahnya intensitas dialog tatap muka menghambat pembentukan kepercayaan, komitmen, dan kesepahaman bersama, yang berdampak pada “hasil antara” program yang masih terbatas dan tidak menyebar merata antar RW.

Untuk memperjelas distribusi peran aktor serta kekuatan dan kelemahan pada masing-masing dimensi *collaborative governance*, hasil analisis penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut.

**Collaborative Governance Pada Program Kang Pisman Di Kelurahan Antapani Tengah Kota Bandung (Nadhif Alghifari dan Entang Adhy Muhtar)**

<b>Dimensi</b>	<b>Aktor yang Terlibat</b>	<b>Kondisi/Kekuatan</b>	<b>Kelemahan/Tantangan</b>
<i>Starting Conditions</i>	DLH, Kelurahan, RW/RT, Masyarakat	Dukungan regulasi dan program sudah tersedia	Ketimpangan kapasitas antar RW, partisipasi belum merata
<i>Institutional Design</i>	DLH, Kelurahan, Pendamping, RW	Struktur kelembagaan dan koordinasi formal sudah ada	Forum belum rutin, komunikasi belum menjangkau semua warga
<i>Facilitative Leadership</i>	Kelurahan, Pendamping, RW	Kelurahan aktif sebagai koordinator	Ketergantungan pada figur tertentu (belum merata)
<i>Face-to-Face Dialogue</i>	Kelurahan, RW, Warga	Ada forum koordinasi formal	Intensitas dialog rendah, belum deliberatif
<i>Trust Building</i>	RW, Pendamping, Warga	Terbangun di RW yang aktif	Tidak merata antar wilayah
<i>Commitment to Process</i>	Semua aktor	Ada keterlibatan awal program	Komitmen belum konsisten, swasta belum aktif
<i>Shared Understanding</i>	Kelurahan, RW, Warga	Tujuan program sudah diketahui	Pemahaman belum seragam
<i>Intermediate Outcomes</i>	RW, Warga	Ada RW yang sudah KBS	Belum menyebar merata

Secara keseluruhan, dimensi collaborative process dalam Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah memperlihatkan bahwa tantangan utama berada pada lemahnya intensitas dialog, ketidakmerataan kepercayaan dan komitmen, serta belum terbentuknya kesepahaman bersama yang stabil. Akibatnya, capaian program muncul secara parsial dan belum mampu menggerakkan perubahan perilaku pemilahan sampah yang konsisten di seluruh RW.

#### **SIMPULAN**

Penelitian tentang analisis implementasi Program Kang Pisman di Kelurahan Antapani Tengah menunjukkan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah yang dirancang berbasis keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya belum menghasilkan capaian yang merata antar Rukun Warga. Temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa praktik kolaborasi masih cenderung bersifat tentatif dan belum terlembagakan secara berkelanjutan, terutama ditandai oleh keterlibatan aktor non-pemerintah seperti sektor swasta yang tidak konsisten serta belum kuatnya mekanisme monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan program. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa capaian ketaatan pemilahan sampah rumah tangga dan status Kawasan Bebas Sampah masih terkonsentrasi

pada sebagian RW, sementara RW lainnya belum menunjukkan konsistensi dan kelembagaan pengelolaan sampah yang memadai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adler, P. A., & Adler, P. (1987). *Membership roles in field research*. Sage Publications.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Blum, H. L. (1978). *Planning for health: Development and application of social change theory*. Human Sciences Press.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theories and methods*. Pearson A & B.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. (2025a). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DLH Kota Bandung*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. (2025b). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi DLH Kota Bandung*.
- Eliza, & Evanita, S. (2023). *Strategi komunikasi*

- model pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, 12(3), 406–412.  
<https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v12i3>
- Gebrekidan, T. K., Weldemariam, N. G., Hidru, H. D., Gebremedhin, G. G., & Weldemariam, A. K. (2024). Impact of improper municipal solid waste management on fostering One Health approach in Ethiopia—challenges and opportunities: A systematic review. *Science in One Health*, 3, 100081. <https://doi.org/10.1016/j.soh.2024.100081>
- Hamdani, B., & Sudarso, H. (2022). Pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tangan guna meningkatkan kreatifitas warga sekitar Dusun Kecil Desa Kertonegoro. *Jurnal Abdiku*, 5(1).
- Kaza, S., Yao, L., Bhada-Tata, P., & Van Woerden, F. (2018). *What a Waste 2.0*. World Bank.
- Keputusan Wali Kota Bandung tentang Satuan Tugas Gerakan Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan. (2020).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Timbulan Sampah Nasional Tahun 2024*.
- Pemerintah Kota Bandung. (2025). *Infografis Kelurahan Antapani Tengah*. Diskominfo.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. (2018).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2017).
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2024). *Timbulan sampah di Kota Bandung Tahun 2021–2024*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2018).
- United Nations. (2025). *Indonesia Indicator*. UN Data.
- Yuanita, P., & Keban, Y. (2020a). Evaluasi efektivitas Program Kang Pisman di Kelurahan Sukaluyu dan faktor yang mempengaruhinya. *Rekayasa Hijau: Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*, 4(2).